



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 14930-14942

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Belanja Publik Daerah dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Febri Heldiani Manurung¹, Pakri Fahmi², Fitriani Ariska³

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

¹febriheldiani7@gmail.com, ²pakrifahmi@yahoo.com, ³fitrianiariska20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja publik daerah yang meliputi belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja pegawai terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu, baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu dalam bentuk data panel. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan logaritma natural untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih stabil dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel belanja pegawai memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang ditunjukkan oleh nilai *t*-statistik sebesar -2,452666 yang lebih besar dari nilai *t*-tabel 2,0. Sementara itu, variabel belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, masing-masing dengan nilai *t*-statistik sebesar -1,310038 dan 1,856051. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pegawai dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan, sedangkan dua jenis belanja lainnya belum memberikan dampak yang signifikan. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai *F*-hitung sebesar 45,87559. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa sebesar 92,13% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 7,87% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, belanja publik daerah memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Tingkat Kemiskinan

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah Kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Masalah kemiskinan di Indonesia cukup rumit karena luas wilayah, beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat, dan pengalaman kemiskinan yang berbagai. Selain itu, masalah kemiskinan juga bersifat multidimensional karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin, kegagalan dalam pemenuhan hak dasar.

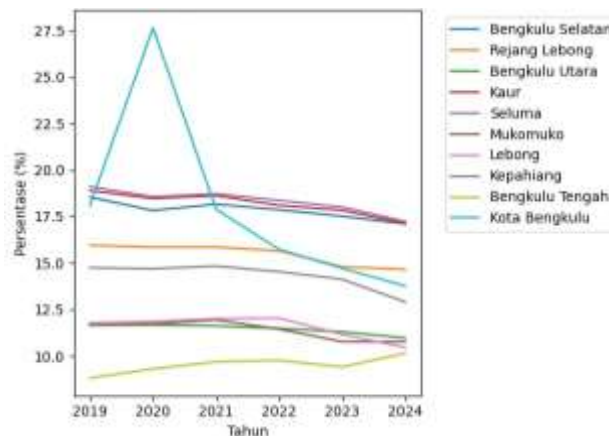
Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, merupakan tantangan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase kemiskinan Indonesia menurun dari 9,41% pada 2019 menjadi sekitar 9–10% pada tahun 2024–2025 setelah sempat meningkat pada masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian, penurunan ini tidak terjadi secara merata antarwilayah. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa termasuk wilayah Sumatera, menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.

Tabel 1. Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia

Peringkat	Provinsi	Persentase Kemiskinan
1.	Papua	26,8%
2.	Papua Barat	21,7%
3.	Nusa Tenggara Timur	21,21%
4.	Maluku	17,99%
5.	Gorontalo	15,59%
6.	Aceh	15,43%
7.	Bengkulu	15,30%
8.	Nusa Tenggara Barat	14,23%
9.	Sulawesi Tengah	13,06%
10.	Sumatera Selatan	12,56%

Sumber : BPS 2023-2024

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel I.1, Bengkulu berada dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi. Pada tahun 2023, Bengkulu tercatat sebagai provinsi termiskin peringkat ke-7 di Indonesia dengan persentase kemiskinan sekitar 15,30%. Di wilayah Sumatera, provinsi seperti Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Selatan memiliki tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Berdasarkan BPS, Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera, dan Bengkulu menempati posisi kedua sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kemiskinan di Bengkulu masih belum teratasi secara signifikan dibanding provinsi lain di wilayah Sumatera dan memerlukan kebijakan fiskal yang efektif.



Sumber : Data Diolah, BPS Bengkulu

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Bengkulu (2019-2024)

Berdasarkan data yang tersaji pada grafik 1.1 persentase penduduk miskin di provinsi Bengkulu tahun 2019-2024, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di sembilan kabupaten menunjukkan trend penurunan secara bertahap walaupun terjadi peningkatan di tahun 2020 akibat dari pandemi COVID-19. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan belanja daerah yang dialokasikan secara efisien, terutama dalam bentuk belanja publik yang produktif, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Selain itu, tren penurunan kemiskinan yang cukup signifikan pada periode 2022–2024 di hampir seluruh kabupaten dapat dikaitkan dengan meningkatnya belanja pemerintah pasca-pandemi COVID-19, yang difokuskan pada program pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki dua jenis pengeluaran utama dalam APBD, yaitu belanja publik daerah dan belanja pegawai. Belanja publik daerah mencakup seluruh pengeluaran yang secara langsung berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan. Belanja Publik daerah terdiri dari belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk pengadaan barang dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sementara itu, belanja modal

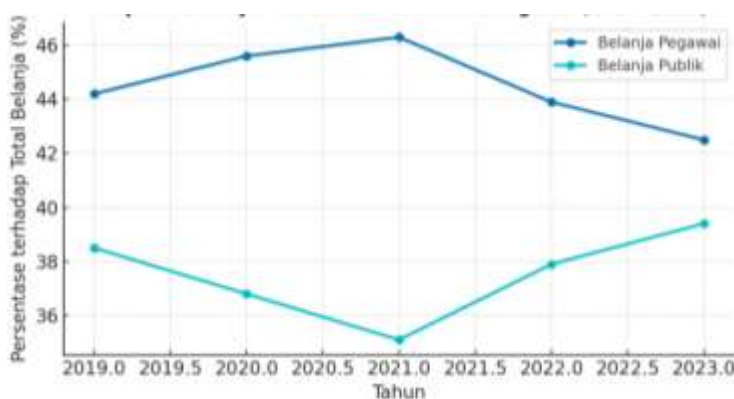
adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun.

Selanjutnya pengeluaran utama dalam APBD adalah belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain yang meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Menurut (Anggun & Sari, 2024), struktur belanja daerah di banyak provinsi di Indonesia masih didominasi oleh belanja pegawai yang proporsinya mencapai lebih dari 40% dari total APBD, sehingga ruang fiskal untuk belanja publik produktif menjadi terbatas. Teori efisiensi alokasi anggaran publik, menekankan bahwa sumber daya fiskal pemerintah harus dialokasikan sedemikian rupa agar menghasilkan output dan outcome pembangunan yang optimal. Menurut teori ini, belanja daerah seharusnya diarahkan pada pengeluaran yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, bukan semata-mata pada belanja rutin seperti gaji pegawai.

Hal ini sejalan dengan temuan (Utami & Rofiuddin, 2022) yang menyatakan bahwa efektivitas belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besar kecilnya anggaran, tetapi juga pada bagaimana dana publik tersebut dialokasikan. Jika porsi belanja publik lebih banyak diarahkan pada kegiatan produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan akan lebih besar.

Menurut teori pertumbuhan endogen, pengeluaran publik yang diarahkan pada peningkatan modal manusia dan fisik tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi tetapi juga menimbulkan efek *spill-over* yang mendorong pertumbuhan dan pada akhirnya dapat membantu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Berdasarkan (Todaro Michael P. & Smith, 2020), tingginya proporsi belanja pegawai tanpa disertai peningkatan produktivitas birokrasi dapat menimbulkan inefisiensi fiskal. Hal ini terjadi karena sebagian besar dana publik terserap untuk kebutuhan rutin pemerintahan, bukan untuk investasi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja publik yang tidak produktif juga memiliki efek pengganda yang rendah terhadap perekonomian daerah, berbeda dengan investasi publik pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memberikan dampak ekonomi lebih luas.



Sumber : Data Diolah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) & BPS Bengkulu
Gambar 2. Persentase Belanja Publik Dan Belanja Pegawai Di Provinsi Bengkulu (2019-2024)

Berdasarkan grafik I.2 tersebut, Di Provinsi Bengkulu proporsi belanja pegawai masih tergolong tinggi dibandingkan dengan belanja publik produktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2023), rata-rata porsi belanja pegawai pemerintah daerah Bengkulu mencapai sekitar 42–45% dari total belanja daerah selama periode 2019–2023. Sementara itu, belanja publik yang mencakup belanja modal, barang dan jasa, masih di bawah 40%. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana komposisi belanja tersebut memengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Selain itu, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap struktur belanja daerah dan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2020–2021, sebagian besar pemerintah daerah melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi, yang menyebabkan belanja modal menurun tajam, sementara belanja pegawai relatif stabil. Kondisi ini memperlambat proses penurunan kemiskinan karena proyek-proyek publik yang menyerap tenaga kerja banyak mengalami penundaan (BPS, 2022).

Fenomena tersebut menjadi dasar penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh belanja publik daerah dan belanja pegawai terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas belanja publik daerah dan belanja pegawai dalam mendorong penurunan kemiskinan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, seimbang antara belanja pegawai dan belanja publik yang produktif, guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perkembangan belanja publik daerah (belanja barang dan jasa, belanja modal) dan belanja pegawai di Provinsi Bengkulu selama periode 2019-2024. Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu selama periode 2019-2024. Apakah belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu tahun 2019-2024. Variabel manakah di antara belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai yang memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

2. Kajian Teori

Teori Ekonomi Keuangan Daerah

Ekonomi keuangan daerah merupakan bagian dari ekonomi publik yang membahas pengelolaan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk pengelolaan PAD, dana perimbangan, dan belanja daerah (Halim, 2019). Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pelimpahan kewenangan keuangan bertujuan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan akuntabilitas. Belanja publik yang efektif, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, terbukti berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan (Prakoso dkk., 2024). Selain itu, konsep multiplier effect menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Dalimunthe dkk., 2023). Kemandirian fiskal juga menjadi indikator penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan kualitas pelayanan publik (Khoirunisa & Sulaeman, 2022).

Teori Belanja Publik Daerah

Belanja publik daerah merupakan pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang dan jasa publik, dengan fungsi utama alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave). Belanja yang diarahkan pada sektor produktif mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas dan ketepatan alokasi. Belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terbukti berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM (Bandiyono, 2018; Kende dkk., 2024). Sebaliknya, dominasi belanja pegawai dapat mengurangi efektivitas fiskal karena membatasi ruang investasi publik (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023).

Teori Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik, seperti pengadaan barang habis pakai dan jasa (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Dalam perspektif ekonomi publik, belanja ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan aktivitas ekonomi daerah. Penelitian menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia (Gosal dkk., 2022; Kreuta dkk., 2020).

Teori Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk memperoleh aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Dalam teori pembangunan ekonomi, belanja ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan akses masyarakat terhadap layanan publik. Infrastruktur yang dibangun mampu mendorong aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja, sehingga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan (Somptan dkk., 2025).

Teori Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk kompensasi ASN yang bersifat rutin dan penting bagi keberlangsungan pelayanan publik (Halim, 2019). Namun, proporsi yang terlalu besar dapat mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif. Dominasi belanja pegawai berpotensi menimbulkan crowding out effect terhadap belanja pembangunan (Sari, 2024) serta menghambat pertumbuhan ekonomi (Mardiana & Fadilah, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang efisien dan berbasis kinerja agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan birokrasi dan pembangunan (Purnomo, 2021).

Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar serta keterbatasan akses terhadap sumber daya (Todaro & Smith, 2020). BPS mengukurnya melalui indikator seperti P0, P1, dan P2 (BPS, 2024). Kemiskinan dapat bersifat absolut maupun relatif, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja. Dalam teori pembangunan, kebijakan fiskal yang tepat sasaran—terutama melalui belanja publik produktif—dapat mengurangi kemiskinan. Teori Human Capital (Becker, 1964) menekankan pentingnya investasi pendidikan dan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, bantuan sosial, dan transfer fiskal berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan (Triyulianto dkk., 2025; Potale dkk., 2024).

3. Metode Penelitian

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan asosiatif, yaitu menggambarkan kondisi belanja publik daerah (belanja barang dan jasa, belanja modal), belanja pegawai, serta tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu, sekaligus menganalisis pengaruh variabel independen—belanja barang dan jasa (X1), belanja modal (X2), dan belanja pegawai (X3)—terhadap tingkat kemiskinan (Y).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data kuantitatif berupa angka statistik realisasi belanja daerah dan tingkat kemiskinan. Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
4. Jurnal dan publikasi ilmiah terkait

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh data belanja daerah dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Sampel berupa data periode 2019–2024 yang dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria ketersediaan data yang lengkap dan konsisten.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu dari publikasi resmi seperti Bengkulu Dalam Angka dan laporan realisasi APBD melalui situs resmi instansi terkait.

Definisi Operasional Variabel

1. Belanja Barang dan Jasa (X1): Pengeluaran untuk barang habis pakai dan jasa (Rp).
2. Belanja Modal (X2): Pengeluaran untuk aset tetap jangka panjang (Rp).
3. Belanja Pegawai (X3): Pengeluaran untuk gaji dan tunjangan ASN (Rp).
4. Tingkat Kemiskinan (Y): Persentase penduduk miskin (%).

Metode Analisis Data

Analisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan software EViews, yang menggabungkan data time series (2019–2024) dan cross section (kabupaten/kota).

1. Pemilihan Model Data Panel
Dilakukan melalui:
 - a. Uji Chow (CEM vs FEM)
 - b. Uji Hausman (FEM vs REM)
 - c. Uji Lagrange Multiplier (CEM vs REM)

Model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) karena mampu menangkap heterogenitas antar daerah.

2. Model Regresi

Model yang digunakan adalah bentuk logaritma natural (log-log) untuk meningkatkan stabilitas data dan interpretasi elastisitas:

$$\text{Ln}Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{Ln}X1_{it} + \beta_2 \text{Ln}X2_{it} + \beta_3 \text{Ln}X3_{it} + \varepsilon_{it}$$

Model ini memungkinkan interpretasi koefisien sebagai elastisitas (perubahan persentase).

3. Uji Asumsi Klasik

Meliputi:

- a. Uji normalitas (Jarque-Bera)
- b. Uji heteroskedastisitas (Glejser/White)
- c. Uji autokorelasi (Durbin-Watson)
- d. Uji multikolinearitas (VIF)

4. Uji Hipotesis

- a. Uji t (parsial): Menguji pengaruh masing-masing variabel independen ($\alpha = 0,05$)
- b. Uji F (simultan): Menguji pengaruh bersama variabel independen
- c. Koefisien Determinasi (R^2): Mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen

4. Hasil dan Diskusi

Uji Pemilihan Model Data Panel

Dalam analisis data panel, terdapat tiga model utama yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model terbaik yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian, dilakukan serangkaian uji spesifikasi model, yaitu:

1. Uji Chow (Uji Likelihood Ratio)

Uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan *Common Effect Model* (CEM).

Hasil Uji Chow:

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FEM			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	53.277582	(9,47)	0.0000
Cross-section Chi-square	144.966023	9	0.0000

Sumber : Data diolah, Eviews 9

Interpretasi Hasil:

- a. Berdasarkan hasil Uji Chow diperoleh nilai Probabilitas Cross-section F sebesar $0.0000 < 0.05$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga modal yang lebih tepat untuk digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).
- b. Hasil dari Uji Chow menunjukkan bahwa adanya perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota yang signifikan, sehingga model Common Effect tidak sesuai untuk digunakan pada penelitian ini.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Hasil Uji Hausman :

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: REM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.031038	3	0.0183

Sumber : Data diolah, Eviews 9

Interpretasi Hasil:

- a. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas sebesar $0.0183 < 0.05$ (lebih kecil dari tingkat signifikan). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

- b. Hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa efek individual antar kabupaten/kota berkorelasi secara signifikan dengan variabel independen, sehingga estimasi menggunakan Fixed Effect Model lebih efisien dan konsisten.

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman yang telah dilakukan, diperoleh bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan Uji Langrange Multiplier (LM), karena uji tersebut dilakukan untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM).

Regresi Data Panel

Berdasarkan Hasil estimasi model regresi yang digunakan menggunakan software Eviews, diperoleh nilai koefisien masing-masing variabel independen yang kemudian disusun ke dalam bentuk persamaan regresi. Model penelitian ini menggunakan model regresi logaritma (log-linear) sehingga seluruh variabel dalam penelitian dinyatakan dalam bentuk logaritma natural (Ln). penggunaan transformasi logaritma bertujuan untuk mengurangi heterokedastisitas serta mempermudah interpretasi elastisitas antar variabel.

Tabel 4. Hasil Estimasi Fem

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.44030	2.860177	3.650230	0.0007
X1	-0.113292	0.086480	-1.310038	0.1965
X2	0.083030	0.044735	1.856051	0.0697
X3	-0.364136	0.148466	-2.452666	0.0179

Sumber : Data diolah, Eviews 9

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LnY} = 10.44030 - 0.113292 \text{ LnX1} + 0.083030 \text{ LnX2} - 0.364136 \text{ LnX3} + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : variabel tingkat kemiskinan
- X1 : variabel belanja barang dan jasa
- X2 : variabel belanja modal
- X3 : variabel belanja pegawai
- e : error term

Persamaan regresi dalam bentuk logaritma dapat ditransformasikan kembali dalam bentuk anti-logaritma untuk memperoleh bentuk hubungan dalam nilai aslinya. Dengan melakukan anti-log terhadap persamaan diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = e^{10.44030} \times X_1^{-0.113292} \times X_2^{0.083030} \times X_3^{-0.364136}$$

Nilai konstanta hasil anti-log dari 10.44030 adalah sekitar 34.297,67, sehingga persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 34.297,67 \times X_1^{-0.113292} \times X_2^{0.083030} \times X_3^{-0.364136}$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada masing-masing variabel independen sesuai dengan besarnya koefisien yang dimiliki oleh masing-masing variabel.

Interpretasi:

- a. Konstanta

Nilai konstanta sebesar 10,44030 menunjukkan bahwa apabila variabel X1, X2, dan X3 dianggap konstan, maka nilai logaritma dari variabel dependen adalah sebesar 10,44939. Dalam bentuk anti-log, konstanta tersebut setara dengan 34.297,67 yang menggambarkan nilai dasar variabel dependen ketika seluruh variabel independen tidak mengalami perubahan.

- b. Koefisien variabel X1 (belanja barang dan jasa)

Koefisien regresi variabel X1 sebesar -0,113292 menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja barang dan jasa sebesar 1% akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,0113292% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Tanda negatif pada koefisien ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel belanja barang dan jasa dan variabel tingkat kemiskinan bersifat berlawanan arah, sehingga peningkatan belanja barang dan jasa (X1) cenderung menurunkan nilai variabel tingkat kemiskinan (y).

- c. Koefisien variabel X2 (belanja modal)

Koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,083030 menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja modal sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,083030%, dengan asumsi variabel lain konstan. Tanda positif dalam koefisien ini menunjukkan bahwa hubungan antara

variabel belanja modal (X2) dan tingkat kemiskinan (Y) bersifat searah, sehingga peningkatan belanja modal (X2) akan meningkatkan nilai variabel tingkat kemiskinan (Y).

d. Koefisien variabel X3 (belanja pegawai)

Koefisien regresi variabel X3 sebesar -0,364136 menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja pegawai sebesar 1% akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,364136% dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa hubungan antara variabel belanja pegawai (X3) dan tingkat kemiskinan (Y) bersifat berlawanan arah, sehingga peningkatan belanja pegawai (X3) akan menurunkan nilai variabel tingkat kemiskinan (Y).

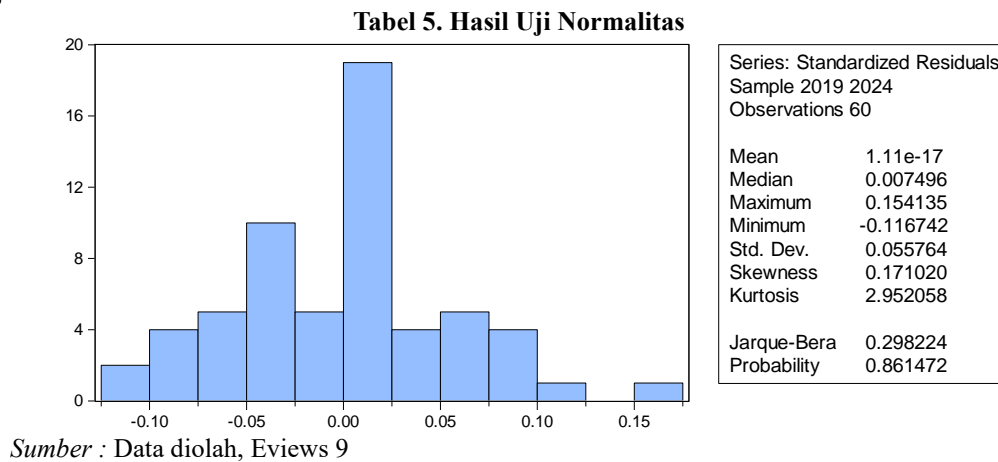
Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat bahwa data yang digunakan memenuhi beberapa asumsi dasar. Uji asumsi klasik mencakup:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan menggunakan Histogram Normality Test dan Jarque Bera (JB) Test.

Hasil uji normalitas:



a. Nilai Jarque-Bera : 0.298224

b. Probability : 0.861472

Interpretasi Hasil:

Karena nilai probability Jarque-Bera sebesar 0.861472 > 0.05, maka residual dalam model berdistribusi normal. Artinya, asumsi klasik tentang kenormalan terpenuhi.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terjadi perubahan varians residual yang tidak konstan. Uji White digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas.

Hasil Uji White:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.98E-10	2.860177	1.04E-10	1.0000
X1	-5.97E-12	0.086480	-6.90E-11	1.0000
X2	-1.95E-12	0.044735	-4.35E-11	1.0000
X3	-7.49E-12	0.148466	-5.04E-11	1.0000

Sumber : Data diolah, Eviews 9

a. Nilai Probabilitas untuk X1: 1.000 (>0.05)

b. Nilai Probabilitas untuk X2: 1.000 (>0.05)

c. Nilai Probabilitas untuk X3: 1.000 (>0.05)

Interpretasi hasil:

Karena semua nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model. Artinya varians residual tetap konstan.

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat ada atau tidak korelasi antar variabel independen.

Hasil Uji Multikolinieritas:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.374661	0.771580
X2	0.374661	1.000000	0.473069
X3	0.771580	0.473069	1.000000

Sumber : Data diolah, Eviews 9

Interpretasi Hasil:

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menggunakan matriks korelasi, diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel independen yaitu X1, X2, X3 seluruhnya berada dibawah 0.9, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinieritas. nilai korelasi tertinggi terdapat pada hubungan antara X1 dan X3 yaitu sebesar 0.771580.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat aukoroleasi dalam model regresi. Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson.

Hasil uji Durbin Watson:

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.921340	Mean dependent var	2.651048
Adjusted R-squared	0.901256	S.D. dependent var	0.245492
S.E. of regression	0.077142	Akaike info criterion	2.097194
Sum squared resid	0.279694	Schwarz criterion	-1.643420
Log likelihood	75.91583	Hannan-Quinn criter.	-1.919698
F-statistic	45.87559	Durbin-Watson stat	1.507362
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah, Eviews 9

Interpretasi Hasil:

Nilai DW-statistik sebesar 1.507362 berada dalam rentang aman (antara 1.5-2.5), sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.

1. Uji t (parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji t:

Tabel 9. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.44030	2.860177	3.650230	0.0007
X1	-0.113292	0.086480	-1.310038	0.1965
X2	0.083030	0.044735	1.856051	0.0697
X3	-0.364136	0.148466	-2.452666	0.0179

Sumber : Data diolah, Eviews 9

Interpretasi Hasil:

- a. variabel X1 (belanja barang dan jasa) memiliki nilai t-statistik sebesar -1.310038 dengan nilai prob. (signifikan) sebesar 0.1965 (>0.05). maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 (belanja barang dan jasa) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (tingkat kemiskinan).
- b. variabel X2 (belanja modal) memiliki nilai t-statistik sebesar 1.856051 dengan nilai prob.(signifikan) sebesar 0.0697 (>0.05). maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 (belanja modal) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (tingkat kemiskinan). Namun, karena nilainya cukup mendekati 0.05 variabel ini dapat dikatakan mendekati signifikan.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8099>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- c. Variabel X3 (belanja pegawai) memiliki nilai t-statistik sebesar -2.452666 dengan nilai prob.(signifikan) sebesar 0.0179 (<0.05). maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X3 (belanja pegawai) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (tingkat kemiskinan).

2. Uji F (simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hasil Uji F:

Tabel 10. Hasil Uji F

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.921340	Mean dependent var	2.651048
Adjusted R-squared	0.901256	S.D. dependent var	0.245492
S.E. of regression	0.077142	Akaike info criterion	2.097194
Sum squared resid	0.279694	Schwarz criterion	-1.643420
Log likelihood	75.91583	Hannan-Quinn criter.	-1.919698
F-statistic	45.87559	Durbin-Watson stat	1.507362
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah, Eviews 9

Interpretasi Hasil:

- Diperoleh nilai F-statistik sebesar 45.87559 dengan Prob (F-statistik) sebesar 0.000000 (<0.05), Maka Ha3 diterima dan Ho3 ditolak. Artinya variabel X1 (belanja barang dan jasa), X2 (belanja modal), dan X3 (belanja pegawai) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Uji R² digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasin (R2)

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.921340	Mean dependent var	2.651048
Adjusted R-squared	0.901256	S.D. dependent var	0.245492
S.E. of regression	0.077142	Akaike info criterion	2.097194
Sum squared resid	0.279694	Schwarz criterion	-1.643420
Log likelihood	75.91583	Hannan-Quinn criter.	-1.919698
F-statistic	45.87559	Durbin-Watson stat	1.507362
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah, Eviews 9

Interpretasi Hasil :

- Diperoleh nilai R-squared sebesar 0.921340, nilai tersebut menunjukkan bahwa 92,13% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdapat dalam model penelitian.
- Sisanya sebesar 7.87% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.
- Nilai R-squared yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan menggunakan software Eviews 9, diperoleh beberapa temuan penting mengenai hubungan antara belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai, serta tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu tahun 2019-2024.

Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Kemsikinan

Berdasarkan hasil regresi, belanja barang dan jasa (X1) memiliki nilai koefisien sebesar -0,113292 dengan nilai Probabilitas sebesar 0,1965. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja barang dan jasa sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,113292% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Namun karena nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikan

yang ditetapkan dan pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, maka belanja barang dan jasa belum terbukti cukup kuat mempengaruhi perubahan tingkat kemiskinan dalam penelitian ini.

Jika dilihat dari perkembangan belanja barang dan jasa selama periode penelitian, nilai barang dan jasa cenderung mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan itu terjadi sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan operasional serta pelayanan publik.

Namun, peningkatan tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena belanja barang dan jasa pada umumnya lebih bersifat pengeluaran operasional yang tidak secara langsung memberikan efek ekonomi jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap tingkat kemiskinan menjadi relatif kecil.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji regresi diperoleh nilai koefisien sebesar 0,083030 dengan Probabilitas sebesar 0,0697. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan perkembangan belanja modal sebelumnya, terlihat bahwa belanja modal mengalami perubahan yang cukup dinamis dari tahun ke tahun. Meskipun secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat. Belanja modal biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, serta investasi pemerintah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengaruh belanja modal belum signifikan. Hal ini dapat terjadi karena dampak belanja modal biasanya bersifat jangka panjang, sehingga pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan tidak langsung terlihat dalam periode penelitian yang relatif terbatas.

Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien sebesar -0,364136 dengan probabilitas sebesar 0,0179. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja pegawai sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,364136% dengan asumsi variabel lain konstan.

Jika dilihat dari perkembangan belanja pegawai, perubahan yang terjadi terlihat cukup jelas selama periode penelitian. Fluktuasi yang terjadi pada belanja pegawai ternyata memiliki keterkaitan yang kuat dengan perubahan tingkat kemiskinan.

Kesimpulan dari hasil ini menunjukkan bahwa belanja pegawai menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan tingkat kemiskinan dalam penelitian ini, dibandingkan dengan variabel lainnya. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada belanja pegawai memiliki kontribusi yang lebih besar dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan selama periode penelitian.

implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu penelitian ini memberikan beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja barang dan jasa agar tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
2. Memprioritaskan belanja modal yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberikan perhatian lebih terhadap belanja pegawai yang terbukti berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, dengan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja agar setiap pengeluaran daerah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan, bukan sekedar penyerapan anggaran.
5. Memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah agar alokasi belanja dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Belanja barang dan jasa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan *t*-tests, dimana belanja barang dan jasa memiliki nilai *t*-statistik sebesar -1.310038 dengan nilai

probability sebesar 0.1965 (>0.05). Artinya, peningkatan barang dan jasa belum memberikan dampak nyata terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, meskipun pengaruhnya belum signifikan secara statistik. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan *eviews*, dimana belanja modal memiliki nilai *t*-statistik sebesar 1.856051 dengan nilai probability sebesar 0.0697 (>0.05). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal berpotensi memberikan dampak positif, namun efeknya cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama. Belanja pegawai terbukti memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan *eviews*, dimana belanja pegawai memiliki nilai *t*-statistik sebesar -2.452666 dengan nilai probability sebesar 0.0179 (<0.05). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan belanja pegawai memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kebijakan daerah. Model regresi data panel menunjukkan bahwa 92% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Bagi Pemerintah Memprioritaskan kebijakan terhadap belanja pegawai supaya menjadi strategi yang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Melakukan evaluasi berkala dan lebih mendalam terhadap efektivitas program belanja barang dan jasa serta belanja modal yang telah dijalankan, supaya lebih tepat sasaran dan merata. Meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi layanan masyarakat. Memprioritaskan belanja modal pada proyek-proyek produktif seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Bagi Masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan maupun keterampilan kerja, agar mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam memanfaatkan program-program yang disediakan oleh pemerintah. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang relevan dengan kemiskinan, seperti tingkat pengangguran, inflasi, atau investasi dan faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang belum dijelaskan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya dalam memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian lebih representatif.

Referensi

1. Anggun, & Sari, N. I. (2024). Pengaruh Realisasi Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022. *Ekodestinas*, 2(1), 17–35. <https://doi.org/10.59996/ekodestinas.v2i1.406>
2. Badan Pusat Statistik. (2023). Provinsi Bengkulu dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.
3. Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Kemiskinan Provinsi Bengkulu 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.
4. Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd edition). John Wiley & Sons.
5. Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Ipm Dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), 11–28. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.235>
6. Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. The University of Chicago Press.
7. Bengkulu, P. (t.t.). Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu 2022.
8. Dalimunthe, Z., Anggeraini, D., Program, H., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., & Binis, D. (2023). Analisis Multiplier Effect Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020.
9. Dartanto, T., & Otsubo, S. (2013). Teguh Dartanto and Shigeru Otsubo Analyses of Multifaceted Poverty and Poverty Dynamics in Indonesia Measurements and Determinants of Multifaceted Poverty: Absolute, Relative, and Subjective Poverty in Indonesia.
10. Deva, G., Ramadhan, G., Aurieliza, M., Radensyah, M., & Putra, A. R. (2025). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Vol. 9, Nomor 6).
11. Deviana, Husaini, & Abdullah. (2018). Analisis Alokasi Belanja Modal Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Pemerintah Kabupaten Seluma. *Jurnal Fairness*, 8(3), 183–198.
12. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). Data Realisasi APBD Tahun 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
13. Edira, R., & Bambang Hermanto, S. (2023). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten Di Jawa Timur. www.djpk.depkeu.go.id
14. Fahmi, P., Ariska, F., Siswanto, A., & Dwiarsyah, T. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Di Pulau Sumatera. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 486–493. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2124>
15. Gosal, J. S., Lopian, A. L. C. P., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado Tahun 2005-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 85–96.
16. Greene, W. H. (2003). *Econometric analysis*. Prentice Hall.
17. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th edition). McGraw-Hill.
18. Halim, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah* (edisi ke-4). UPP STIM YKPN.
19. Hasan, M. I. (2015). *Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Bumi Aksara.
20. Kende, T. A., Hafizrianda, Y., & Ngutra, R. N. (2024). Efektivitas Dan Efisien Belanja Daerah Untuk Pembangunan Manusia Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 9, 221–246.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8099>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

21. Khoirunisa, I., & Sulaeman, A. S. (2022). Fiscal Decentralization: Is There a Simultaneous Relationship Between Regional Independence and Social Welfare? *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 213–226. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.848>
22. Kreuta, B., Dwi Atmaja, D., & Purbariani, I. A. (2020). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 7(3), 1–10.
23. Mardiana, D., & Fadilah, N. (2022). Analisis Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 101–115.
24. Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Rajawali Pers.
25. Mustika, C., Haryadi, H., Junaidi, J., & Zamzami, Z. (2022). The Relationship Between Absolute Poverty Income Inequality in Rural and Urban Areas in Indonesia: The Granger Causality Approach. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 107–118. <https://doi.org/10.23960/jep.v11i2.541>
26. Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit FE UI.
27. Nailufar Fanny, Sari, M. P. C., & Hendri Muhammad. (2023). THE EFFECT OF EMPLOYEE EXPENDITURE, CAPITAL EXPENDITURE, GOODS AND SERVICES EXPENDITURE ON GROSS DOMESTIC PRODUCT IN INDONESIA. *Journal Of Maliksussaleh Public Economics*, 6(2). <https://doi.org/10.723>
28. Potale, A., Indriyani Dai, S. S., & Rahmad Santoso, I. (2024). ANALISIS STRUKTUR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA Informasi Artikel. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 17. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ONM/index>
29. Prakoso, M. F. D., Hans, M., & Wicesa, N. A. (2024). Measuring The Efficiency of Public Spending In Combating Poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 14–27. <https://doi.org/10.23960/jep.v13i2.3520>
30. Purnomo, R. (2021). Pengaruh Belanja Pegawai dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(3), 45–59.
31. Putri, C., & Yefriza, Y. (2025a). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. *jesya*, 8(1), 266–275. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1859>
32. Putri, C., & Yefriza, Y. (2025b). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. *jesya*, 8(1), 266–275. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1859>
33. Sari, W. K. (2024). Analisis Struktur Belanja Daerah dan Dampaknya terhadap Efisiensi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 23–37.
34. Sompotan, G. B., Rori, G. A., & Malau, N. A. (2025). PENGARUH BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Equilibrium*, 6(1), 43–54.
35. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
36. Todaro Michael P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th edition). Pearson Education.
37. Triyulianto, T., Rizkia, B. S., & Hidayaturahmi, H. (2025). Toni Triyulianto, dkk-1. *Governance and Government Journal*, 6(1), 1–15.
38. Utami, I. T., & Rofiuddin, M. (2022). Analisis pengaruh upah minimum, belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi mayoritas muslim. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(3). <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i3.463>
39. Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (5th edition). South-Western Cengage Learning.
40. Wooldridge, J. M., Brazil, A. •, Mexico, •, & Singapore, •. (2016). *Introductory econometrics*. www.cengage.com/highered
41. Yustie, R., & Heriqbaldi, U. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011 (Vol. 24). University of Virginia Press.